

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945, serta diperkuat oleh TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 yang mengatur tentang ekonomi politik dalam negeri dalam kerangka demokrasi ekonomi, pentingnya menciptakan UMKM sebagai bagian integral dari perekonomian nasional sangatlah ditekankan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, maju, dan adil. Definisi UMKM diberikan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008. Secara rinci, pengertian UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a. Usaha Mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perorangan dengan aset tidak lebih dari Rp 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 300.000.000 per tahun.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak berafiliasi dengan usaha menengah atau besar, dengan nilai aset antara Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 (tanpa termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), dan memiliki

¹² Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM.

- penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri dan tidak berafiliasi dengan usaha kecil atau besar, dengan nilai penghasilan bersih antara Rp 500.000.000 hingga Rp 100.000.000.000, serta penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000.
 - d. Usaha Besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih dan penjualan tahunan yang melebihi usaha menengah. Ini termasuk usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang beroperasi di Indonesia, dengan penghasilan lebih dari Rp 10.000.000.000, termasuk tanah dan bangunan, serta pendapatan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000.
 - e. Dunia Usaha merupakan kumpulan dari usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan memiliki tempat tinggal di Indonesia.

Berdasarkan pengertian UMKM yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan dan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih, berdasarkan kelompok usaha masing-masing.

Tujuan dalam pengelompokan usaha UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan analisis data terkait dengan ilmu pengetahuan.

- b. Untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan UMKM.
- c. Meyakinkan pemilik modal atau para pengusaha dalam menentukan posisi perusahaan mereka.
- d. Mempertimbangkan badan tertentu terkait dengan mengantisipasi kinerja perusahaan.¹³

2. Urgensi Pengembangan UMKM

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk aktif terlibat dalam mengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM secara prinsip dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Keterbukaan UMKM dalam menghadapi tantangan global dan meningkatnya persaingan memerlukan kreativitas dalam pengelolaan produk dan layanan, serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi. Perluasan pasar juga menjadi fokus, sehingga UMKM dapat meningkatkan nilai tambah produknya. Khususnya, dalam menghadapi arus barang impor yang semakin meningkat dan mengancam industri manufaktur domestik, penting bagi UMKM untuk dapat bersaing dengan penawaran asing.

Peningkatan peran UMKM tidak diragukan lagi dalam mendukung ekonomi nasional, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Namun, untuk tetap relevan dalam era globalisasi, UMKM harus mampu mengadaptasi inovasi dan teknologi dalam produksi dan pemasaran produk mereka. Sumber daya manusia yang terampil dan

¹³ Partomo, T. dan A. Soejodono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi* (Jakarta: Ghalia, 2004).

up-to-date dengan perkembangan teknologi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan global. Dalam konteks ini, strategi yang fokus pada pengembangan SDM dan teknologi menjadi esensial bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi akademis menjadi penting dalam mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Melalui program-program pemberdayaan dan dukungan kelembagaan, UMKM dapat meningkatkan daya saingnya. Pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai tambah serta akses pasar yang lebih luas akan membantu UMKM untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan global. Dengan demikian, pemerintah perlu mendorong kolaborasi lintas-sektor dan memperkuat infrastruktur pendukung bagi pertumbuhan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.¹⁴

Banyak penelitian telah mengkaji dan memberikan masukan dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto menyoroti bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini dianggap sebagai langkah yang tepat, mengingat sektor UMKM memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja, mencapai sekitar 99,45% dari total tenaga kerja yang terserap. Selain itu, sektor UMKM juga memiliki

¹⁴ Sudaryanto, "The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness. International Journal of Education and Development," dalam JEDICT, Vol. 7 No. 1 (2011).

peran penting dalam menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara, dengan kontribusi mencapai sekitar 30%.

Pendekatan yang mengutamakan pengembangan UMKM sebagai solusi dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia dinilai sangat strategis. Hal ini karena UMKM tidak hanya memberikan peluang kerja bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan dukungan dan pemberdayaan bagi UMKM, baik dari segi kebijakan maupun sumber daya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹⁵

Usaha dalam mempresentasikan dan mengembangkan sektor UMKM memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja yang signifikan, sehingga dapat berkontribusi secara langsung dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mengatasi masalah kemiskinan. Sebagai bagian integral dari perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting. Data menunjukkan bahwa sebanyak 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, yang mana sektor ini menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Kontribusinya yang signifikan

¹⁵Supriyanto. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*. Vol. 3, No. 1. Hal 1-16. (2006.)

ini berasal dari berbagai sektor ekonomi yang dijalankan oleh UMKM.

Dari sekian banyak sektor ekonomi, UMKM memiliki peranan yang luas dan terdiversifikasi. Sebagai contoh, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 48,85% dari total kontribusi PDB yang berasal dari UMKM. Selanjutnya, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga memberikan kontribusi yang signifikan sebesar 28,83%. Sementara itu, sektor-sektor lainnya seperti pengangkutan, komunikasi, industri pengolahan, serta jasa-jasa juga turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Dengan demikian, berbagai sektor ekonomi tersebut mencerminkan keberagaman dan keterlibatan UMKM dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi di Indonesia.

Peran serta UMKM dalam kontribusi ekonomi Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari berbagai sektor yang telah disebutkan, UMKM menunjukkan ketahanan dan keberlanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan. Pengembangan dan penguatan UMKM menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendukung dan memperkuat sektor UMKM agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹⁶

¹⁶ Sarwono, Hartadi A. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Kerjasama Bank Indonesia. (2015).

3. Jenis Pengembangan UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengembangan UMKM merupakan usaha yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersama-sama. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penyediaan fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan. Fokus utama dari upaya pengembangan adalah untuk merangsang pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UMKM dengan cara berikut:

- a. Pasal 19 dalam UU No. 20 Tahun 2008 menguraikan bahwa pengembangan di bidang sumber daya manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan berikut: menggalakkan dan memperkuat kultur kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta membentuk dan memperluas lembaga pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan peningkatan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengembangan UMKM. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha mengenai teknologi dan manajemen yang dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka.

c. Pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan adalah langkah strategis dalam mendukung pengembangan UMKM. Lembaga ini bertugas menyediakan berbagai program pendidikan, pelatihan, dan motivasi bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola bisnis. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam menciptakan dan mengembangkan wirausaha baru untuk memperkaya ekosistem bisnis UMKM.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor UMKM bertujuan untuk memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan secara efektif. Langkah ini melibatkan peningkatan keterampilan teknis dan manajerial melalui upaya pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan motivasi, kreativitas bisnis, dan mendukung lahirnya lebih banyak wirausaha baru. Semua ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka meningkatkan kinerja dan kontribusi UMKM dalam perekonomian.

UMKM memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan besar, di antaranya¹⁷:

a. Inovasi dalam teknologi untuk mempermudah proses produksi dan pengembangan produk.

¹⁷ Titik Sartika Partomo & Abd Ranchman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

- b. Hubungan kerja yang lebih akrab dan manusiawi di dalam lingkungan perusahaan kecil.
- c. Berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, dibandingkan dengan perusahaan besar yang sering kali terbelenggu oleh birokrasi.
- e. Dinamisme dalam manajemen dan peran kewirausahaan yang lebih aktif.

Dalam hal produk yang dihasilkan, UMKM memiliki ciri khas tersendiri, termasuk:

- a. Kualitas produknya bervariasi karena sebagian besar UMKM belum menggunakan teknologi yang canggih. Hasil produksinya sering kali handmade sehingga standar kualitasnya belum terjamin.
- b. Desain produk terbatas karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tersebut. Banyak UMKM masih bekerja berdasarkan pesanan dan jarang melakukan inovasi desain.
- c. Jenis produk yang dihasilkan juga terbatas karena UMKM umumnya hanya fokus pada beberapa jenis produk saja. Mereka sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan akan model baru dan membutuhkan waktu yang cukup lama jika menerima pesanan tersebut.

- d. Kapasitas produksi dan harga produk sering kali terbatas dan sulit ditetapkan dengan jelas, menyebabkan kesulitan bagi konsumen.
- e. Bahan baku yang digunakan tidak selalu terstandar karena diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- f. Kontinuitas produksi sering kali tidak terjamin dan kurang konsisten karena UMKM belum memiliki sistem produksi yang teratur, sehingga produk yang dihasilkan cenderung bervariasi dalam kualitas dan kesempurnaannya.¹⁸

4. Tinjauan Islam Terhadap Pengembangan UMKM

a. Pengertian usaha mikro perspektif ekonomi syari'ah

Dalam perspektif Islam, usaha atau berbisnis adalah sesuatu yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Diketahui bahwa dalam sejarah, Nabi Muhammad sendiri pernah menjadi seorang pedagang atau wiraswasta. Bahkan, banyak dari sahabat-sahabat Nabi pada masa itu yang sukses sebagai pengusaha dan memiliki modal yang besar. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan di bumi ini sebagai khalifah, yang bertanggung jawab atas pengelolaan yang diberikan oleh Allah. Dalam konteks modern, hal ini diwujudkan melalui berbisnis atau wirausaha.

Ekonomi syariah melihat UMKM sebagai bagian dari usaha manusia untuk menjaga hidupnya dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, jabatan, atau pangkat seseorang.

¹⁸Sanjaya, Putu Krisna Adwitya. I Putu Nuratama. Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang. Hal 15-18. (2021).

Sebaliknya, menolak untuk berusaha atau berbisnis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah, yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban di hadapan-Nya dan Rasul-Nya pada akhirat.

Pentingnya usaha dan berbisnis dalam Islam juga tercermin dalam ajaran Mujahit, yang menegaskan bahwa menentang perintah Allah dapat menghadirkan ancaman. Amalan ibadah seseorang akan dievaluasi oleh Allah dan Rasul-Nya, serta oleh umat Islam lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi, usaha dan berbisnis tidak hanya dianggap sebagai cara untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Dengan cara ini, setiap individu diharapkan untuk mengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b. Karakteristik usaha mikro menurut persepektif ekonomi syari'ah

Dalam syari'ah Islam, telah diatur tata cara sosialisasi antar manusia, hubungan dengan Allah, serta aturan hukum yang meliputi halal dan haram, serta aspek kehidupan lainnya, termasuk aktivitas bisnis. Hal ini bertujuan agar seorang Muslim senantiasa menjaga perilakunya dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Karakteristik usaha mikro menurut perspektif ekonomi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro bersifat ketuhanan, yang berarti bahwa dasar peraturannya berasal dari Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.
- 2) Usaha mikro bersifat keakidahan, yang berakar dari aqidah Islam yang mengharuskan pertanggungjawaban terhadap keyakinan agama yang diyakini.
- 3) Usaha mikro bersifat ta'abudi, yang mengacu pada ketaatan terhadap aturan yang didasarkan pada ketuhanan.
- 4) Usaha mikro terkait erat dengan akhlak, karena Islam tidak memisahkan antara akhlak dan ekonomi, dan menganggap bahwa pembangunan ekonomi dalam konteks Islam harus dijalankan dengan adab yang baik.
- 5) Usaha mikro bersifat elastis, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Hadist yang menjadi dasar ekonomi Islam.
- 6) Usaha mikro harus bersifat objektif, di mana umat Islam diajarkan untuk bertindak secara objektif tanpa membedakan antara jenis kelamin, warna kulit, agama, dan lain-lain.
- 7) Usaha mikro harus realistis, karena ekonomi tidak selalu sesuai antara teori dan praktiknya.
- 8) Pelaku usaha mikro harus memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan.
- 9) Kekayaan atau harta memiliki prinsip bahwa itu adalah milik Allah, dan kekayaan seseorang tidak bersifat mutlak.¹⁹

¹⁹ Hi. Sasto Wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam* (Jakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2001), hal 52.

5. Strategi Pengembangan Dalam Islam

Menurut perspektif Griffin, strategi merujuk pada sebuah rencana menyeluruh yang bertujuan mencapai tujuan organisasi. Namun, lebih dari sekadar pencapaian, strategi juga dirancang untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi di lingkungan di mana organisasi beroperasi. Dalam konteks bisnis, strategi digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi yang efektif dalam bisnis bertujuan untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan perusahaan.²⁰

Dalam ajaran Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di muka bumi ini, yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan serta membangun perekonomian masyarakat. Dalam perspektif ini, pekerjaan yang dilakukan dengan baik dihargai dan berpotensi mendatangkan dampak positif, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT mengetahui dengan pasti bagaimana seseorang bekerja, apakah dengan jujur atau tidak.²¹

Dalam Islam, usaha atau bisnis mencakup berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, pelayanan, dan konsumsi. Islam memberikan pandangan komprehensif terhadap bisnis, dengan mempertimbangkan aspek dunia dan akhirat. Sukses dalam bisnis,

²⁰Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

²¹ Gusnita Rahayu, "Strategi Pengembangan Usaha Mukena Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di lihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus: Jorong Angge Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019), 2.

menurut ajaran Islam, tidak hanya diukur dari kesuksesan materi dalam kehidupan dunia, tetapi juga sejauh mana bisnis tersebut memberikan manfaat bagi pelakunya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, bisnis yang benar-benar berhasil adalah bisnis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga memberikan manfaat spiritual dan moral yang berkelanjutan.

Dalam mengelola suatu bisnis, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan profitabilitas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek krusial adalah pengembangan strategi bisnis yang efektif. Strategi pengembangan bisnis memegang peranan penting dalam mengarahkan langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan suatu usaha. Proses pengembangan bisnis umumnya melibatkan beberapa tahapan yang meliputi penemuan ide usaha, perumusan konsep bisnis, studi kelayakan usaha, perhitungan kebutuhan investasi, serta penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis beserta pengendalian yang diperlukan.

Strategi pengembangan bisnis ini dapat diimplementasikan melalui berbagai metode yang dapat meningkatkan kemungkinan sukses usaha, seperti memperluas skala operasi dengan menambah kapasitas produksi, tenaga kerja, dan modal kerja untuk investasi. Selain itu, meningkatkan standar dan kualitas produk serta layanan juga menjadi fokus utama dalam upaya pengembangan bisnis. Perbaikan kualitas SDM dan pembangunan jiwa kewirausahaan di

dalam UMKM juga menjadi strategi yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi pengembangan bisnis bukan hanya sekedar proses analisis potensi pertumbuhan, tetapi juga melibatkan dukungan dan pemantauan pelaksanaan ide-ide tersebut untuk menumbuhkan bisnis. Melalui strategi dan implementasi pertumbuhan yang terencana dengan baik, diharapkan bisnis yang dijalankan dapat bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan, membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan serta pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan.

Dengan demikian, keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga oleh seberapa baik strategi pengembangan bisnis yang diterapkan. Dengan adanya strategi yang matang, bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan bisnis yang telah ditetapkan.²²

Guna menghadapi persaingan di pasar, UMKM perlu mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Selain langkah-langkah strategis, terdapat juga unsur-unsur penting dalam pemasaran yang memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan pemasaran. Unsur-unsur pokok tersebut meliputi:

²² Gusnita Rahayu, "Strategi Pengembangan Usaha Mukena Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di lihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus: Jorong Angge Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019), 2-4.

a. Strategi Produk

Ini mencakup upaya para pedagang dalam mengembangkan produk, termasuk pembentukan merek, desain kemasan, inovasi produk, dan keputusan label. Memiliki strategi produk yang kuat membantu UMKM untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian konsumen.

b. Strategi Harga

Penetapan harga merupakan aspek penting dalam strategi pemasaran. Harga tidak hanya mencerminkan nilai produk, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas dan nilai produk tersebut. Tujuan penetapan harga dapat bervariasi, mulai dari mempertahankan eksistensi di pasar, maksimalkan profitabilitas, hingga memperluas pangsa pasar dan menjaga kualitas produk.

c. Strategi Tempat

Lokasi dan distribusi produk juga memiliki peran krusial dalam pemasaran. Penentuan lokasi yang strategis dan memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung, memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mengakses produk dan layanan UMKM. Strategi tempat juga mencakup pemilihan lokasi yang sesuai dengan target pasar yang dituju.

d. Strategi Promosi

Promosi merupakan upaya pemasaran yang ditujukan untuk mengkomunikasikan program-program pemasaran secara persuasif

kepada target pelanggan atau calon pelanggan. Melalui berbagai saluran komunikasi dan teknik promosi yang efektif, UMKM dapat meningkatkan kesadaran merek, menarik minat konsumen, dan mendorong terciptanya transaksi antara perusahaan dan pelanggan.²³

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi persaingan yang ketat, UMKM dapat mengembangkan beberapa strategi untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Strategi-strategi tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam pemasaran:

- a. Strategi produk yang meliputi pembentukan merek, desain kemasan, inovasi produk, dan keputusan label. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, UMKM dapat membedakan produk mereka dari pesaing dan menarik perhatian konsumen.
- b. Strategi harga yang melibatkan penetapan harga dengan mempertimbangkan tujuan seperti memaksimalkan laba, memperbesar pangsa pasar, dan menjaga kualitas produk. Penetapan harga yang tepat dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai produk dan mendukung pencapaian tujuan bisnis.
- c. Strategi tempat juga penting untuk memastikan bahwa pada ketersediaan produk dan layanan UMKM yang mudah dijangkau oleh konsumen. Fasilitas yang baik dan kenyamanan yang diberikan kepada konsumen juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.

²³ Mihani dan Thomas Robert Hutaaruk, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Dapur Etam Sejahtera Samarinda Dalam Meningkatkan Penjualan" Jurnal Riset Inossa, Vol. 2, No. 2, 2020. 114.

d. Strategi promosi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan produk atau jasa secara persuasif kepada konsumen. Melalui berbagai saluran komunikasi dan teknik promosi yang efektif, UMKM dapat meningkatkan kesadaran merek, menarik minat konsumen, dan mendorong terciptanya transaksi dengan konsumen. Dengan menggabungkan strategi-strategi ini secara holistik, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan mencapai kesuksesan dalam pasar yang kompetitif.

B. Tinjauan umum Kesejahteraan

1. Definisi Teori Kesejahteraan

Welfare State, sebuah teori besar dalam kesejahteraan masyarakat yang diperkenalkan oleh Bentham (1748-1832), mengusung gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan terbesar (kesejahteraan) bagi sebanyak mungkin warganya. Dalam konsep ini, Bentham menggunakan istilah "*utility*" atau kegunaan untuk menggambarkan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya, Bentham berargumen bahwa segala sesuatu yang dapat meningkatkan kebahagiaan ekstra dianggap baik, sedangkan yang menimbulkan penderitaan dianggap buruk.²⁴

Definisi kesejahteraan, sebagaimana diuraikan oleh W.J.S Poewodarmintos, menggambarkan keadaan sejahtera di mana masyarakatnya hidup dalam keamanan, kesejahteraan, dan minim

²⁴Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", Jurnal Sospol, Vol. 2 No.1 (2016), 103.

kesalahan atau kesulitan. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Sosial Nomor 11 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah keadaan yang memenuhi kebutuhan materi, rohani, dan sosial warga negara untuk memungkinkan mereka memiliki hidup yang baik, bermartabat, dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing.²⁵

Hingga saat ini, terdapat tiga model penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dikenal. Pertama, adalah residual welfare state yang memberikan sedikit intervensi publik dan lebih memperhatikan swastanisasi. Kedua, adalah model institusional/*universalist welfare state* yang menekankan peran negara dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif. Terakhir, adalah *social insurance welfare* yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini melibatkan integrasi fungsi pemerintah, dunia usaha, dan buruh untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.²⁶

2. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan manusia dapat dievaluasi melalui berbagai indikator, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Indikator fisik meliputi angkatan kerja, tingkat ekonomi, tingkat kriminalitas, dan akses media massa, sementara indikator non-fisik

²⁵Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Rafika Aditama, 2014), 16.

²⁶ Darmawan Tribowo & Sugeng Bahagijo, "Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 29

mencakup aspek seperti kesejahteraan sosial dan psikologis. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan metode pengukuran yang komprehensif. IPM terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi umur yang mencakup harapan hidup, dimensi manusia terdidik yang melibatkan tingkat pendidikan dan melek huruf, serta standar hidup yang layak yang meliputi akses terhadap kesehatan, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan mempertimbangkan indikator-indikator ini secara holistik, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia dalam suatu masyarakat.

Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, komponen-komponen tersebut dapat membedakan kegiatan sosial dengan kegiatan lainnya, komponen-komponen tersebut adalah:

a. Organisasi formal

Penyelenggara yang melaksanakan proyek di bidang sosial organisasi sosial resmi untuk mendapatkan pengakuan masyarakat akan memberikan pelayanan, memberikan pelayanan adalah tugas utama organisasi sosial.

b. Keuangan

Penggunaan dana merupakan tanggung jawab bersama karena baik dinas sosial maupun dunia usaha tidak mencari keuntungan.

c. Kebutuhan manusia

Jaminan sosial memperhatikan kebutuhan setiap orang dan tidak terfokus pada satu aspek saja untuk memenuhi kebutuhan setiap orang.

d. Kapasitas profesional

Pelayanan sosial tentunya diberikan sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

e. Dokumen hukum dan undang-undang

Pentingnya ketentuan hukum yang ada untuk menyediakan pelayanan sosial secara terstruktur dan tepat sasaran.

f. Partisipasi masyarakat

Oleh karena itu, kegiatan amal mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

g. Data dan informasi

Data dan informasi diperlukan untuk memudahkan penyampaian layanan sosial yang efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator kesejahteraan dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain: organisasi formal, keuangan, kebutuhan manusia, kapasitas profesional, dokumen hukum dan Undang-undang, partisipasi masyarakat dan data serta informasi. Hal ini sangat penting sekali agar kesejahteraan dapat berjalan dengan optimal serta sumber daya yang ada dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, sebagaimana yang disusun oleh BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) pada tahun 1995 yaitu:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Merujuk pada keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti memiliki akses makanan yang memadai dan layanan kesehatan yang dasar. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan keluarga:

- a. Umumnya, setiap keluarga memiliki kebiasaan makan dua kali sehari atau lebih.
- b. Setiap anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan, seperti rumah, pekerjaan, sekolah, dan perjalanan.
- c. Sebagian besar bagian rumah memiliki lantai yang bukan dari tanah.
- d. Ketika anak sakit, mereka mendapat pengobatan yang modern atau dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang sesuai.

c. Keluarga Sejahtera II

Merujuk kepada keluarga yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi juga kebutuhan sosial dan psikologis, namun belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan. Indikator yang digunakan untuk menilai keluarga dalam kategori ini mencakup beberapa kriteria berikut:

- a. Setidaknya sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan, atau telur sebagai lauk pauk.
- b. Setiap anggota keluarga mendapatkan setidaknya satu set pakaian baru dalam setahun.
- c. Luas lantai rumah minimal 8 meter persegi untuk setiap penghuni.
- d. Semua anggota keluarga di bawah usia 60 tahun memiliki kemampuan membaca tulisan Latin.
- e. Semua anak usia 6 hingga 12 tahun sedang bersekolah.
- f. Setidaknya satu anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas memiliki pekerjaan tetap.

Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir berada dalam keadaan sehat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, serta menjalankan ibadah secara teratur sesuai dengan keyakinan agamanya.

d. Keluarga Sejahtera III

Merujuk kepada keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial-psikologis, dan kebutuhan pengembangan, namun belum aktif dalam berbagai

kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk dikategorikan sebagai keluarga Sejahtera III, keluarga harus memenuhi persyaratan yang ada pada keluarga Sejahtera I dan Sejahtera II, serta memenuhi persyaratan tambahan berikut:

- a. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk ditabung.
- b. Keluarga biasanya makan bersama setidaknya satu kali sehari.
- c. Keluarga secara rutin turut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
- d. Keluarga melakukan rekreasi di luar wilayah tempat tinggal setidaknya satu kali dalam tiga bulan.
- e. Keluarga memiliki akses untuk memperoleh informasi dari surat kabar, radio, atau majalah.
- f. Anggota keluarga memiliki kemampuan menggunakan sarana transportasi yang tersedia di daerah setempat.

Kategori Keluarga Sejahtera III Plus merujuk kepada keluarga yang telah memenuhi semua kriteria pada keluarga Sejahtera I, Sejahtera II, dan Sejahtera III. Selain itu, keluarga Sejahtera III Plus secara teratur berkontribusi dalam kegiatan sosial dengan memberikan sumbangan materi, dan anggota keluarganya aktif sebagai pengurus dalam perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

Pada umumnya, keluarga-keluarga yang berada dalam kategori pra sejahtera dan sejahtera I dapat dibagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama terdiri dari keluarga-keluarga yang hidup dalam kondisi miskin atau sangat miskin, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang pendidikan atau buta huruf, terkena musibah yang beruntun, tidak mampu bekerja, rentan, cacat, janda yang memiliki banyak anak, dan berbagai sebab lain yang membuat mereka sulit untuk bangkit sendiri. Mereka sering kali tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan keluarga mereka. Kelompok kedua terdiri dari keluarga-keluarga yang kurang peduli terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Mereka sering kali tidak aktif dalam gerakan pembangunan, tidak bergabung dengan organisasi seperti PKK, tidak mengikuti program keluarga berencana (KB), tidak memperhatikan kesehatan dengan baik, dan tidak mengikuti anjuran atau informasi pembangunan yang disampaikan melalui berbagai media. Sebagian dari mereka mungkin tidak miskin secara finansial, namun kurangnya akses terhadap informasi membuat mereka tidak melihat perlunya berusaha untuk mengikuti arah pembangunan yang ada. Untuk kelompok pertama, mereka memerlukan bantuan dan dukungan agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Sedangkan untuk kelompok kedua, mereka memerlukan bantuan dalam bentuk informasi dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam upaya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya dan kondisinya

mereka.²⁷

3. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan bisa dipahami sebagai keadaan di mana seseorang merasa aman, sejahtera, dan terlindungi dari berbagai gangguan dan kesulitan. Hal ini juga mencakup kesuksesan dan kejayaan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan sejati, penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang, sehingga menciptakan kondisi yang disebut *mashlahah*, yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia.²⁸

Al-Ghazali menekankan bahwa kesejahteraan terwujud melalui tercapainya keuntungan, yang sejalan dengan tujuan hukum syariah (*Maqasid al-Shari'ah*). Baginya, kebahagiaan batin hanya dapat diraih setelah manusia mencapai kebahagiaan sejati yang melibatkan pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia sesuai dengan tujuan syariah.²⁹

Dalam pandangan ekonomi Islam, konsep kesejahteraan tidak terbatas pada aspek materi semata. Ekonomi Islam mengadvokasi kemakmuran yang mencakup seluruh dimensi material dan spiritual

²⁷ Wawan Oktriawan, Siti Alisa, "Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwokerto", *Jurnal Riset*, Vol. 3 No. 1, 2022, 5

²⁸ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 46.

²⁹ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Di*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010).

manusia, mengakui bahwa kebahagiaan manusia tidak hanya bersifat nyata atau material.³⁰

Dalam konteks ini, masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri, yang tercermin dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Anbiya (21), ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya’ 21: 107).³¹

Ayat di atas menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kesejahteraan sosial, menurut pandangan Al-Qur'an, melibatkan berbagai aspek, termasuk fisik, sosial, dan spiritual. Interaksi antara aspek-aspek kebahagiaan tersebut menegaskan bahwa kurangnya kesejahteraan sosial dapat dirasakan ketika salah satu aspeknya tidak terpenuhi. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai kesejahteraan sosial dengan nilai-nilai ketakwaan dan pengabdian kepada Allah. Seperti dalam QS al-Nisa' 4:36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَجُورًا

³⁰Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Mumayyaz* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 257.

Terjemahnya: *Bersujudlah kepada Allah dan janganlah mengaitkan-Nya dengan apapun. Lakukanlah kebaikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, orang yang sedang dalam perjalanan, serta hamba sahayamu. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri.*³²

Ayat ini menjelaskan tanggung jawab manusia secara spesifik dan umum. Secara spesifik, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah dengan penuh penghormatan dan ketaatan, serta menjauhi penyekutuan denganNya. Sementara secara umum, manusia memiliki tanggung jawab untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, teman sejawat, sesama manusia, orang yang dalam perjalanan, dan orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang memenuhi kewajiban ini akan meraih berbagai keberuntungan, kebahagiaan, dan kedamaian di dunia dan akhirat.³³

Selain itu, keamanan sosial di dalam suatu masyarakat akan tercipta ketika sistem sosialnya stabil, terutama dalam konteks keamanan. Kestabilan sosial ekonomi tidak dapat dipertahankan tanpa adanya stabilitas keamanan, yang juga mencakup stabilitas politik. Ini diperkuat oleh doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 2:126;

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), 84.

³³ Ayi Erma Azizah, 'Konsep Al-Qur'an tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Tafsir Tematik)', Skripsi (Banten : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016), 79-80.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya: *Dalam doanya, Ibrahim memohon kepada Tuhannya agar menjadikan Mekah sebagai sebuah negeri yang aman dan memberikan rezeki kepada penduduknya, terutama kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah menjawab doa Ibrahim dengan menyatakan bahwa orang-orang kafir akan diberi kesenangan sesaat, namun kemudian akan dihukum dengan azab neraka, yang merupakan tempat yang paling buruk untuk kembali".³⁴*

Ayat di atas menjelaskan bahwa di mana ia memohon agar negeri Mekah menjadi tempat yang aman dan penduduknya diberi rezeki yang melimpah, khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan hidup seseorang terjamin ketika ia memiliki keyakinan kepada Allah.

Al-Quran menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan konsep kesejahteraan, seperti al-Falah, aman, salam, dan masalah. Istilah "al-falah" misalnya, merujuk pada tujuan utama hidup manusia di dunia ini. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada tuhan selain Allah di bumi ini dan orang yang menyadari kekuasaan-Nya akan merasakan kesejahteraan hidup. Selain itu, hubungan baik antara manusia dan hubungan yang kuat dengan Tuhan juga merupakan kunci dalam menciptakan kesejahteraan jiwa manusia. Dalam konteks ini, menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, dan

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 19.

kebutuhan keindahan menjadi sangat relevan dalam menjamin kesejahteraan manusia.³⁵

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah upaya untuk menjaga kepentingan baik dalam ranah agama maupun dunia. Hal ini mengimplikasikan bahwa keberadaan *dharuriyat* sangatlah vital, karena jika *dharuriyat* tersebut terabaikan, maka tidak hanya kesejahteraan dalam dunia ini yang terancam, tetapi juga kehidupan di masa mendatang. Kehilangan *dharuriyat* dapat berdampak serius, bahkan bisa menyebabkan kerugian dan kehancuran dalam kehidupan. Diantara *dharuriyat* yang penting adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga kehormatan.

b. *Hajiyat*

Hajiyat merujuk pada hal-hal yang dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan dan mengatasi kesulitan yang bisa menimbulkan bahaya atau ancaman, terutama ketika hal-hal yang seharusnya ada tidak tersedia. Dibandingkan dengan *Tahsiniyat*, *Hajiyat* memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi karena fokus pada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan. Meskipun dalam beberapa kajian usul fiqh, pembahasan tentang *Hajiyat* bersifat

³⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Edisi 1 (Bandung: Kencana, 2011), 164.

ritual dan vertikal, penting untuk menafsirkannya secara lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Beban-beban kehidupan seperti beban ekonomi, sosial, politik, dan lainnya, memerlukan kelapangan dan kemudahan yang disediakan oleh ajaran agama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat atau kebutuhan tersier, merujuk pada kebutuhan yang dipengaruhi oleh harga diri, norma, dan gaya hidup yang dikehendaki. Pembahasan ini sering kali berkaitan dengan kebutuhan akan penampilan yang indah. Dalam konteks kajian usul fiqh, *Tahsiniyat* sering kali dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan seperti pakaian, kendaraan, dan makanan mewah. Meskipun relevan, namun ketika dilihat dari perspektif realitas kehidupan, penafsiran semacam itu terkadang terasa tidak relevan. Masalah-masalah seperti kekeringan, kelaparan, deforestasi, banjir, tanah longsor, dan pemanasan global, menjadi perhatian utama yang mengingatkan bahwa ada aspek kebutuhan yang lebih mendesak dan harus dipenuhi..³⁶

³⁶ Ridwal Jamal, “*Maqasyid Al Syariah dan relevansinya dalam konteks kekinian*” Jurnal Penelitian (Manado, IAIN Manado), 2020, 10